

Diplomasi 'Wolf Warrior': Respons Kebijakan Luar Negeri Cina pada Masa Pandemi COVID-19

Vichy Fitri Ramanda¹, Agus Trihartono², Djoko Susilo³
Universitas Jember¹²³

ABSTRACT

The aggressive and assertive 'wolf warrior' diplomacy that carried out by Chinese diplomats during the COVID-19 pandemic received international attention. Diplomats as state representative of a country took aggressive actions and resulted questions from various parties. This study seeks to explain the factors that influenced the aggressive actions of Chinese 'wolf warrior' diplomats. This study uses a qualitative method which uses theory to conceptually view the phenomenon of 'wolf warrior' diplomacy carried out by China. Using neoclassical realism theory, this paper describes the factors that influenced the emergence of 'wolf warrior' diplomacy as China's foreign policy response. Neoclassical realism combines external and internal factors in the analysis of foreign policy. The result of this study shows that the emergence of 'wolf warrior' diplomacy was influenced by international pressure due to COVID-19 as an external factor as well as the influence of the leader's image and strategic culture as internal factors.

Keywords: China, COVID-19, foreign policy, neoclassical realism, wolf warrior diplomacy

ABSTRAK

Diplomasi agresif dan asertif 'wolf warrior' yang dilakukan oleh diplomat Cina pada masa pandemi COVID-19 mendapatkan perhatian internasional. Diplomat sebagai representasi sebuah negara melakukan tindakan yang agresif dan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Studi ini berupaya untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi tindakan agresif diplomat 'wolf warrior' Cina. Artikel ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teori untuk memandang konseptual fenomena diplomasi *wolf warrior* yang dilakukan oleh Cina. Dengan menggunakan teori realisme neoklasik, artikel ini menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi munculnya diplomasi *wolf warrior* sebagai respons Cina. Realisme neoklasik menggabungkan faktor eksternal dan internal dalam analisis politik luar negeri. Studi ini menunjukkan bahwa kemunculan diplomasi *wolf warrior* dipengaruhi oleh tekanan internasional akibat COVID-19 sebagai faktor eksternal serta pengaruh dari citra pemimpin dan budaya strategis sebagai faktor internal.

Kata Kunci: Cina, COVID-19, diplomasi *wolf warrior*, kebijakan luar negeri, realisme neoklasik

A. PENDAHULUAN

Cina menarik perhatian dunia internasional setelah kemunculan penyakit pernapasan baru pada Desember 2019 di kota Wuhan. Penyakit ini disebabkan oleh varian virus baru yang disebut *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam waktu beberapa bulan, infeksi COVID-19 menyebar dengan cepat ke berbagai negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (WHO, 2020).

Pandemi ini menyebabkan Cina menghadapi kritik, tuduhan, dan peningkatan persepsi negatif di dunia internasional. Virus yang pertama kali muncul di negara tersebut membuat banyak pihak menyalahkan Cina atas penyebarannya. Cina dianggap tidak sigap dalam

[*corresponding author: vichy.fitri@gmail.com]

menangani penyebaran virus hingga akhirnya menyebabkan pandemi (Zhu, 2020). Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa Cina sengaja membuat virus COVID-19 ini. Menurut survei Pew Research Center, pandangan negatif terhadap Cina meningkat signifikan di 14 negara yang disurvei dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Silver et al., 2020). Isu terkait asal-usul COVID-19 dan kebijakan Cina dalam menangani penyebaran virus menjadi faktor utama yang memperburuk pandangan negatif tersebut. Kritik dan tuduhan yang diarahkan kepada pemerintah Cina kemudian dijawab dengan respons kontroversial oleh diplomatnya, yang dikenal sebagai diplomasi '*wolf warrior*'.

Diplomasi *wolf warrior* merujuk pada tindakan agresif dan asertif yang dilakukan oleh diplomat Cina dalam merespons kritik selama pandemi COVID-19. Istilah ini menggambarkan diplomat Cina sebagai 'prajurit serigala' yang membela dan melindungi negaranya. Namun, pendekatan ini mendapat tanggapan negatif dari berbagai pihak internasional, salah satunya datang dari Nicolas Chapuis. Ia merupakan perwakilan Uni Eropa, yang dalam *International Energy Executive Forum 2021*, menyatakan bahwa Uni Eropa dan Amerika Serikat perlu bekerja sama melawan diplomasi koersif dan diplomasi *wolf warrior* (Reuters, 2020). Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Cina, melalui juru bicaranya Hua Chunying, menegaskan bahwa tindakan para diplomat Cina adalah hak negara dan merupakan respons yang sesuai dengan posisi Cina saat ini (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2020).

Kemunculan diplomasi *wolf warrior* di tengah pandemi COVID-19 membuat posisi Cina dalam politik internasional menjadi semakin rumit. Tindakan diplomat Cina yang agresif dan asertif dalam menanggapi isu-isu yang menyangkut negaranya menimbulkan kontroversi dan menuai kritik dari berbagai pihak. Respons pemerintah Cina yang seakan mendukung tindakan para diplomatnya memunculkan pertanyaan lebih lanjut dari komunitas internasional mengenai kebijakan diplomasi dan politik luar negeri Cina. Artikel ini berupaya menganalisis diplomasi *wolf warrior* dan faktor-faktor yang mendorong kemunculannya dengan pendekatan teori realisme neoklasik, yang membantu menjelaskan faktor-faktor di balik tindakan diplomatik tersebut selama pandemi COVID-19.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitian. Metode kualitatif bertujuan untuk meneliti fenomena serta memahami alasan di balik terjadinya fenomena tersebut. Metode ini diterapkan bersamaan dengan kerangka kerja teoritis (Taylor et al., 2015). Penelitian kualitatif dimulai dari pengumpulan data mengenai fenomena tertentu dan menggunakan kerangka teori sebagai pemandu untuk menjelaskan fenomena tersebut. Metode ini memastikan teori yang digunakan sesuai dengan data yang diperoleh dari fenomena di lapangan. Dalam artikel ini, yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi adalah realisme neoklasik.

Teori realisme neoklasik pertama kali diperkenalkan oleh Gideon Rose pada tahun 1998 melalui tulisannya "*Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*". Teori ini merupakan gabungan dari dua teori realisme klasik dan neorealisme (Rose, 1998). Meskipun berasal dari dua alur realisme, realisme neoklasik berusaha menambahkan elemen yang sering diabaikan oleh para realis, yaitu karakteristik internal negara atau faktor domestik (Jackson & Sørensen, 2013). Rose (1998) menjelaskan bahwa realisme neoklasik menggabungkan faktor internal dan eksternal dalam menganalisis kebijakan luar negeri di kancah politik internasional. Faktor

eksternal yang memengaruhi teori ini adalah struktur sistem internasional, seperti anarki dan keseimbangan kekuatan. Menurut teori ini, ambisi kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh struktur sistem internasional, khususnya kapabilitas kekuatan relatifnya. Namun, faktor eksternal ini tidak secara langsung menentukan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut harus melalui proses domestik negara, yang menjadi elemen internal dalam analisis kebijakan luar negeri menurut realisme neoklasik.

Teori realisme neoklasik berargumen bahwa pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh interaksi antara faktor eksternal dan internal yang saling memengaruhi (Jackson & Sørensen, 2013). Teori ini menggunakan beberapa variabel dalam menganalisis tindakan negara atau kebijakan luar negeri suatu negara. Struktur sistem internasional bertindak sebagai variabel independen, sementara kebijakan luar negeri negara tersebut menjadi variabel dependen. Namun, teori ini menyatakan bahwa sistem internasional, sebagai variabel independen, tidak secara langsung memengaruhi variabel dependen. Ada variabel intervening yang berfungsi untuk menerjemahkan tekanan atau dorongan dari sistem internasional (variabel independen) menjadi tindakan atau kebijakan luar negeri suatu negara (variabel dependen) (Rose, 1998).

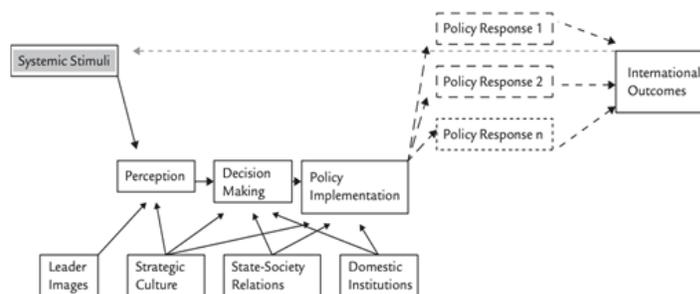
Gambar 1. Logika Kausal dalam Teori Realisme Neoklasik



Sumber: *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy* (1998)

Gideon Rose (1998) berpendapat bahwa pengaruh struktur sistem internasional terhadap tindakan atau kebijakan luar negeri suatu negara harus melalui proses domestik (faktor internal). Pengaruh ini dimediasi oleh proses politik domestik yang bergantung pada kondisi dan periode waktu tertentu (Lai, 2013). Berdasarkan argumen ini, Ripsman, Taliaferro, dan Lobell (2016) mengembangkan lebih lanjut teori realisme neoklasik untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam buku mereka yang berjudul "*Neoclassical Realist Theory of International Politics*," mereka menyajikan diagram yang menggambarkan bagaimana dorongan sistemik masuk ke dalam suatu negara, serta bagaimana proses domestik dan variabel intervening memengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri sebagai respons terhadap tekanan dari sistem internasional tersebut.

Gambar 2. Diagram alur analisis kebijakan luar negeri dalam teori realisme neoklasik



Sumber: *Neoclassical Realist Theory of International Politics* (2016)

Menurut teori Ripsman et al. (2016), tekanan sistemik (*systemic stimuli*) sebagai faktor eksternal akan direspons melalui tiga proses domestik, yaitu persepsi, pembuatan keputusan, dan implementasi kebijakan. Ketiga proses ini dipengaruhi oleh empat kategori variabel intervening: yaitu *leader images* (citra pemimpin), *strategic culture* (budaya strategis), *state-society relations* (hubungan negara-masyarakat), dan *domestic institutions* (institusi domestik). Masing-masing variabel intervening memiliki tingkat pengaruh yang berbeda pada aspek tertentu dari kebijakan luar negeri dalam waktu tertentu. Citra pemimpin sangat berpengaruh ketika negara harus mengambil keputusan cepat dan menjaga kerahasiaan. Variabel kedua, budaya strategis, berkaitan dengan tradisi, ideologi, pola perilaku, tingkat nasionalisme, serta nilai dan norma kolektif negara. Elemen-elemen ini membentuk respons negara dalam menyesuaikan diri dengan sistem internasional dan menghadapi tekanan global (Booth, 1990; Kupchan, 1994). Budaya strategis bisa memandu atau membatasi pilihan kebijakan yang dibuat oleh para eksekutif kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Executives/FPE*) saat menghadapi krisis. Dalam jangka panjang, budaya strategis juga menjadi acuan bagi FPE dalam merumuskan strategi besar (*grand strategy*).

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, variabel hubungan negara-masyarakat dan institusi domestik cenderung memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan yang cepat. Saat menghadapi situasi krisis dalam jangka pendek, keputusan lebih banyak bergantung pada pemimpin dan/atau eksekutif kebijakan luar negeri (FPE). Kelompok masyarakat dan lembaga pemerintahan dianggap dapat memperlambat proses pengambilan keputusan (Ripsman et al., 2016). Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah aktor yang terlibat serta aspek yang perlu dipertimbangkan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama. Namun, kedua variabel ini berpengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Keterlibatan kelompok masyarakat dan institusi pemerintahan domestik sering kali diperlukan dalam proses perumusan kebijakan, seperti perubahan strategi nasional. Keterlibatan dua variabel ini menjadi penting dalam perencanaan kebijakan jangka panjang karena FPE biasanya cenderung menghindari konflik dengan preferensi dari kedua variabel tersebut. Secara keseluruhan, teori realisme neoklasik dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena yang beragam. Teori ini dapat menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri, penyesuaian strategi besar suatu negara, serta pola hasil politik dan perubahan dalam struktur internasional (Ripsman et al., 2016)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi *wolf warrior* yang diterapkan oleh diplomat Cina selama krisis COVID-19 menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik tindakan tersebut. Teori realisme neoklasik membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi dan menjelaskan motivasi di balik diplomasi *wolf warrior* selama krisis ini. Cina, yang dituduh sebagai penyebab kekacauan global akibat infeksi COVID-19, mendapati dirinya dalam posisi yang terjepit. Sebagai *rising power*, Cina berusaha memperbaiki citra negaranya di tingkat internasional. Krisis COVID-19 dan posisi Cina di arena internasional mendorong eksekutif kebijakan luar negeri (FPE) Cina untuk mengambil keputusan dengan cepat. Diplomat Cina berperan sebagai pelaksana keputusan cepat melalui langkah-langkah diplomasi *wolf warrior*, yang akhirnya menjadi sumber kontroversi. Dalam pengambilan keputusannya, tekanan internasional yang dialami

Cina diproses melalui mekanisme domestik yang memengaruhi tindakan luar negeri mereka. Proses domestik dalam merespons tekanan internasional ini dipengaruhi oleh beberapa variabel intervening. Dalam menghadapi krisis, variabel intervening yang relevan dalam memengaruhi proses domestik adalah citra pemimpin dan budaya strategis.

COVID-19 dan Tekanan Internasional terhadap Cina

Teori realisme neoklasik mengemukakan bahwa tekanan dari sistem internasional mempengaruhi respons perilaku dan kebijakan luar negeri suatu negara (Ripsman et al., 2016). Dalam konteks ini, COVID-19 menjadi salah satu tekanan internasional yang membentuk respons Cina di tingkat global. Pandemi COVID-19 menempatkan seluruh dunia dalam situasi krisis, menghadapkan masyarakat global pada tantangan kesehatan dan ekonomi. Sebagai negara yang pertama kali mengalami infeksi, Cina berupaya menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalkan penyebaran virus dan kerugian material. Kebijakan yang diambil oleh Cina menarik perhatian pemerintah negara-negara lain, yang berfokus pada bagaimana cara Cina menangani penyebaran infeksi virus baru tersebut.

Sebagai pusat penyebaran pertama infeksi COVID-19, Cina menghadapi banyak tekanan dari komunitas internasional. Banyak negara lain di dunia menyalahkan dan mengkritik Cina atas penyebaran virus ini. Beberapa tokoh politik Barat bahkan menggunakan istilah seperti "*China Virus*," "*Chinese Flu*," "*Wuhan Virus*," dan "*Kung Flu*" untuk merujuk pada virus COVID-19. Istilah-istilah ini dimaksudkan untuk menyoroti Cina sebagai sumber awal kemunculan virus tersebut, dengan konotasi yang menyinggung. Salah satu tokoh politik yang menggunakan sebutan tersebut adalah Donald Trump, yang menyebut virus COVID-19 sebagai *China Virus* (Nagy & Nguyen, 2020).

Stigma negatif terhadap Cina meningkat secara signifikan sejak awal pandemi COVID-19 (Pew Research Center, 2020). Peningkatan stigma ini terjadi seiring dengan berbagai kritik dan tuduhan yang ditujukan kepada Cina. Kritik dan tuduhan tersebut menyoroti isu-isu terkait asal mula virus COVID-19. Beberapa pejabat dari negara lain secara eksplisit menyampaikan seruan dan kritik terhadap Cina mengenai transparansi data mengenai sumber virus tersebut. Contohnya adalah Kanselir Jerman, Angela Merkel, yang mendesak agar Cina lebih terbuka dalam memberikan informasi tentang asal virus COVID-19 (Lau & Wong, 2020).

Pemerintah Australia mengambil langkah yang serupa dengan Jerman. Melalui Perdana Menteri, Scott Morrison, Australia menyatakan bahwa seruan untuk menyelidiki asal-usul COVID-19 dari Tiongkok adalah hal yang wajar (Karp & Davidson, 2020). Australia, bersama beberapa negara lainnya, menandatangani pernyataan bersama yang mendesak WHO untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait asal virus COVID-19 (U.S. Department of State, 2021). *Joint statement* ini dikeluarkan menyusul rilis laporan penelitian bersama antara WHO dan Tiongkok. Setelah laporan tersebut dirilis, banyak pihak yang meragukan independensi, kredibilitas, dan intervensi Tiongkok terhadap isi laporan tersebut.

Sebanyak 14 negara ikut menandatangani pernyataan bersama yang menuntut agar penelitian mengenai asal mula virus COVID-19 dilakukan dengan transparan, independen, dan tanpa campur tangan. Negara-negara yang menandatangani pernyataan tersebut meliputi Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Norwegia, Denmark, Israel, Estonia, Latvia, Lituania, Slovenia, dan Republik Ceko. Selain itu, Uni Eropa juga menyampaikan pernyataan yang sejalan dengan pernyataan bersama tersebut (Gan, 2021).

Pernyataan bersama ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Tiongkok.

Cina menghadapi tekanan dari banyak pihak di tingkat internasional terkait asal-usul virus COVID-19. Selain itu, Tiongkok juga harus menghadapi beragam kritik terkait kebijakan penanganan infeksi virus tersebut. Menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center di 14 negara, sekitar 61% responden menilai bahwa Cina telah menangani infeksi COVID-19 dengan buruk (Silver et al., 2020). Hasil survei menunjukkan bahwa 13 dari 14 negara yang disurvei berpendapat bahwa Tiongkok tidak berhasil dalam penanganan COVID-19. Sebagai negara yang menjadi pusat awal penyebaran infeksi, Tiongkok menjadi sorotan karena upaya-upaya penanganan yang mereka lakukan. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Tiongkok untuk menemukan langkah penanganan yang efektif.

COVID-19 benar-benar menempatkan Cina dalam posisi yang sulit di kancah internasional. Selain menghadapi penyebaran virus, Cina juga berupaya untuk memperbaiki citranya di dunia internasional. Kritik dan tuduhan yang dilontarkan oleh berbagai pihak memengaruhi diplomat Cina untuk melakukan tindakan yang dikenal sebagai diplomasi *wolf warrior*. Umumnya, negara memberikan arahan kepada diplomatnya berdasarkan kebijakan luar negeri yang telah ditetapkan (Leguey-Feilleux, 2008). Krisis mendadak akibat infeksi COVID-19, serta tekanan dari banyak pihak di tingkat internasional, mendorong FPE Cina (dalam hal ini diplomat) untuk mengambil keputusan.

Peningkatan Posisi Cina di Internasional

Teori realisme neoklasik berpendapat bahwa ambisi kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh struktur sistem internasional, terutama oleh kapabilitas kekuatan relatifnya. Peningkatan kekuatan dan perubahan posisi Cina dalam sistem internasional menjadi faktor yang mendorong terjadinya diplomasi *wolf warrior*. Selama lima puluh tahun terakhir, Cina telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam bidang ekonomi, militer, dan pengaruh politik. Kenaikan kekuatan ini menempatkan Cina sebagai negara yang sedang berkembang (*rising power*) dalam sistem internasional. Peningkatan di sektor ekonomi, militer, dan pengaruh politik tersebut sering disebut sebagai *China's Rise* (kebangkitan Cina).

Kehadiran Cina dengan kekuatan yang dimilikinya memengaruhi dinamika dalam sistem internasional. Beberapa ahli berpendapat bahwa kekuatan *rising power* Cina dapat mengganggu stabilitas tatanan regional dan internasional (Kim, 2021). Negara yang memiliki kekuatan *rising power* cenderung berusaha memaksimalkan kekuatan mereka, yang pada akhirnya menciptakan persaingan yang tak terhindarkan dengan negara-negara dominan (S. Zhao, 2022). Sebagai *rising power*, Cina bersaing dengan Amerika Serikat, yang merupakan negara dominan dalam sistem internasional. Cina telah berhasil bersaing dengan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan militer, menjadikannya sebagai pesaing utama bagi negara yang selama ini paling berpengaruh di dunia (Jones, 2024). Dengan semakin meningkatnya kekuatan Cina, persaingan antara Cina dan Amerika Serikat menjadi tidak dapat dihindari.

Persaingan antara Cina dan Amerika Serikat, serta perubahan interaksi dalam lingkungan internasional, berpengaruh terhadap pembentukan kebijakan pemerintah Cina. Strategi kebijakan luar negeri Cina dapat dilihat dengan mengamati peluang dan tantangan yang muncul akibat perubahan lingkungan internasional tersebut. Pemerintah Cina dapat menetapkan strateginya dengan menyesuaikan diri terhadap kondisi internasional serta

kekuatan yang dimiliki (Ripsman et al., 2016). Perubahan interaksi dan dinamika di lingkungan internasional, sebagai akibat dari meningkatnya kekuatan Cina, menjadi salah satu faktor sistemik yang bertindak sebagai variabel independen dalam teori realisme neoklasik yang dikemukakan oleh Ripsman.

Citra Pemimpin Xi Jinping

Kekuatan Cina serta peluang dan tantangan dalam sistem internasional memengaruhi proses pengambilan keputusan oleh para pemimpinnya. Namun, hal ini bukan satu-satunya faktor yang menentukan kebijakan luar negeri Cina. Kebijakan tersebut diputuskan melalui sudut pandang pemimpin Cina, berdasarkan persepsi mereka terhadap kepentingan nasional serta peluang dan ancaman dalam dinamika internasional (S. Zhao, 2022). Karakteristik, ideologi, serta perspektif pemimpin ini yang kemudian dikenal sebagai citra pemimpin.

Teori realisme neoklasik menyatakan bahwa citra pemimpin merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan kebijakan. Citra pemimpin mencerminkan cara pandang mereka terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan internasional, yang berfungsi sebagai tekanan sistemik. Citra ini juga menggambarkan kecenderungan pemimpin dalam merespons tekanan tersebut (Cheng, 2022). Pemimpin Cina memiliki ciri khas masing-masing yang tercermin dalam kebijakan domestik dan luar negeri yang mereka buat.

Teori realisme neoklasik menyatakan bahwa citra pemimpin merupakan salah satu faktor penting dalam penentuan kebijakan. Citra pemimpin mencerminkan cara pandang mereka terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan internasional, yang berfungsi sebagai tekanan sistemik. Citra ini juga menggambarkan kecenderungan pemimpin dalam merespons tekanan tersebut (Cheng, 2022). Pemimpin Cina memiliki ciri khas masing-masing yang tercermin dalam kebijakan domestik dan luar negeri yang mereka buat selama masa pemerintahan yang dijalankannya.

Setiap pemimpin Cina memiliki citra dan pengaruh yang berbeda dalam kebijakan yang dijalankan. Deng Xiaoping, misalnya, dikenal dengan kebijakan luar negeri yang *low-profile* (Cabestan, 2020). Kebijakan seperti itu membuat Cina tidak terlalu menonjol di kancah internasional. Cina cenderung bersikap pasif dan berhati-hati dalam interaksi hubungan luar negeri. Deng mulai menerapkan kebijakan *low-profile* setelah melaksanakan reformasi ekonomi yang sukses membawa kemajuan bagi negara. Ia melihat peluang di sistem internasional melalui pembukaan investasi dan perdagangan global (Benvenuti et al., 2022), dan untuk menjaga peluang tersebut, Deng memilih kebijakan yang hati-hati agar dapat terus membangun kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara lain.

Beberapa pemimpin Cina setelah Deng tetap melanjutkan kebijakan ini, tetapi arah kebijakan berubah drastis setelah Xi Jinping berkuasa. Xi menjadikan kebijakan luar negeri Cina lebih berani dan aktif, meninggalkan pendekatan *low-profile* dan mendorong negara untuk berjuang mencapai prestasi (*strive for achievements*) (Chang-Liao, 2016). Di bawah kepemimpinan Xi, Cina menjadi lebih ambisius dan proaktif dalam mengejar kepentingan nasionalnya.

Xi tidak menunda-nunda dan segera memulai agenda luar negeri yang lebih proaktif. Ia ingin membedakan dirinya dari pemimpin sebelumnya dengan kebijakan yang lebih berani dan tegas untuk mencapai "*China Dream*"—sebuah konsep yang merujuk pada upaya Xi

membalikkan penghinaan Cina di masa lalu dan membangun kembali kejayaan negaranya (Gill, 2022).

Konsep "*China Dream*" merupakan visi kepentingan nasional yang diusung oleh Xi Jinping. Xi meyakini bahwa tujuan utama bangsa Cina di era modern adalah mencapai 'peremajaan besar bangsa Cina'. Narasi tentang peremajaan ini berakar pada sejarah dan pengalaman nasional Cina, khususnya terkait dengan masa "abad penghinaan" (Wang, 2014). Meski pemimpin-pemimpin Cina sebelumnya juga menggunakan narasi ini, Xi menekankan pada cita-cita dan kejayaan masa depan, bukan trauma masa lalu seperti yang dilakukan pemimpin periode sebelumnya. Konsep ini bertujuan untuk menjadikan Cina sebagai tempat yang lebih kuat, makmur, dan maju.

Melalui *China Dream*, Xi Jinping berusaha meningkatkan rasa percaya diri dan nasionalisme masyarakat Cina terhadap negaranya dan nilai-nilai yang melekat pada Cina. Dalam pidatonya pada Kongres Rakyat Nasional tahun 2013, Xi menyampaikan bahwa masyarakat harus memiliki keyakinan pada jalan, teori, dan sistem dengan karakteristik Cina, serta terus maju dengan keberanian dan keteguhan. Xi juga menekankan pentingnya persatuan di antara 1,3 miliar warga Cina untuk menjadi kekuatan yang tak terkalahkan (Xinhua, 2013). Konsep ini bertujuan untuk mempererat persatuan nasional.

Di bidang hubungan luar negeri, *China Dream* diwujudkan melalui sikap percaya diri dan proaktif di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Ia mengubah pendekatan *low-profile* yang sebelumnya dipegang Cina, dan pada konferensi nasional luar negeri tahun 2013, Xi memperkenalkan istilah "berjuang untuk mencapai prestasi" (*strive for achievement/SFA*) dalam kebijakan luar negeri Cina (Gill, 2022). Melalui SFA, Xi berupaya mempertahankan dan meningkatkan kekuatan yang telah diraih Cina.

Strategi SFA menjadi bagian penting dari peremajaan bangsa Cina dan upaya mencapai *China Dream*. Strategi ini bertujuan untuk membangun lebih banyak hubungan pertemanan dengan negara lain dengan cara memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan Cina (Xuetong, 2014). SFA juga membantu menciptakan lingkungan internasional yang mendukung peremajaan bangsa Cina, serta memperkuat citra Cina di dunia. Salah satu manifestasi dari SFA adalah peluncuran inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) atau *Belt and Road Initiative* (BRI), yang memperlihatkan langkah berani Cina dalam mengambil tanggung jawab global sesuai dengan kepentingan, kemampuan, dan statusnya sebagai *rising power* dengan kekuatan terbesar kedua di dunia.

Belt and Road Initiative (BRI) diluncurkan oleh Xi Jinping pada tahun 2013 bersamaan dengan strategi *Strive for Achievement* (SFA). BRI merupakan proyek infrastruktur besar-besaran yang bertujuan meningkatkan perdagangan, konektivitas, komunikasi, dan kolaborasi ekonomi di wilayah sasaran seperti Eurasia, Amerika Latin, dan Afrika (Tsuji, 2024). Dengan menawarkan peluang bagi negara lain, Cina menciptakan hubungan timbal balik dan memperkuat pengaruhnya yang tumbuh seiring berjalannya proyek ini. Xi Jinping melihat posisi Cina, sebagai *rising power* dengan kekuatan ekonomi yang sedang berkembang, menggunakan momentum ini untuk memperkuat posisi politik Cina di panggung internasional.

Kebijakan luar negeri proaktif Xi Jinping juga mencakup penerapan konsep Diplomasi Negara Besar atau *Major Country Diplomacy*, yang secara resmi diperkenalkan pada Konferensi Pusat Pekerjaan terkait Hubungan Internasional pada 22-23 Juni 2018. Dalam konferensi ini, Xi

menggarisbawahi beberapa aspek penting dari visinya, termasuk usaha mencapai kepentingan nasional, membangun komunitas global dengan masa depan bersama (*shared future*), memimpin BRI dan kerja sama yang saling menguntungkan (*win-win cooperation*), memimpin reformasi sistem tata kelola global, serta menjaga kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional Cina (Hu, 2019). Aspek-aspek ini mencerminkan rasa percaya diri Xi terhadap kekuatan dan karakteristik yang telah dicapai oleh Cina.

Kepentingan nasional yang diupayakan oleh Xi Jinping dan Partai Komunis Cina mencerminkan pandangan serta ideologi Xi sebagai pemimpin. Xi menunjukkan sikap ambisius dan visioner dalam mengidentifikasi peluang serta tantangan yang muncul di kancah internasional. Dia berusaha mentransformasikan pandangan tersebut menjadi kebijakan luar negeri Cina, dengan fokus kuat pada kepentingan nasional. Xi juga bertekad untuk mempertahankan dan mewujudkan ambisinya dalam mencapai tujuan nasional bagi negaranya.

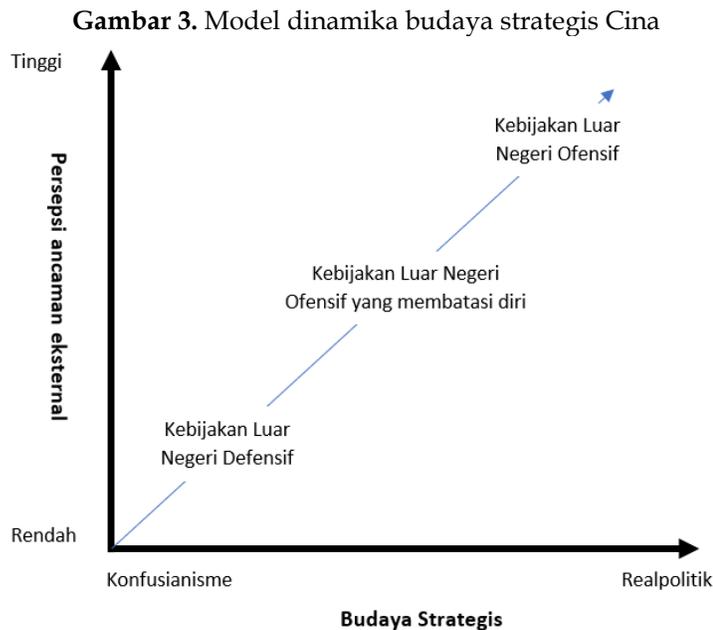
Budaya Strategis Cina

Budaya strategis Cina menjadi faktor lain yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri. Menurut teori realisme neoklasik, budaya strategis berperan dalam menentukan pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pembuat kebijakan luar negeri (FPE) ketika menghadapi krisis (Ripsman et al., 2016). Sejarah dan budaya suatu negara merupakan elemen internal yang mempengaruhi pembentukan kebijakan luar negeri, di mana setiap negara memasuki sistem internasional dengan warisan budaya dan sejarah yang panjang. Cina, dengan sejarah dan budaya yang kuat, merupakan salah satu contohnya.

Para ahli berpendapat bahwa budaya strategis mencakup tradisi, ideologi, pola perilaku, tingkat nasionalisme, serta nilai-nilai dan norma-norma yang dianut secara kolektif oleh negara tersebut. Aspek-aspek ini memengaruhi tindakan negara dalam menyesuaikan diri di kancah internasional dan menangani tekanan eksternal (Booth, 1990; Kupchan, 1994). Alastair Johnston (1995), dalam penelitiannya tentang budaya strategis Cina, menjelaskan adanya dua pendekatan yang saling bersaing, yakni Konfusianisme dan *Parabellum*. Konfusianisme mencerminkan preferensi idealis dan simbolis, yang digunakan sebagai acuan perilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai budaya, bukan sebagai pedoman formal dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, *Parabellum* adalah pendekatan *hard realpolitik* yang mendorong penggunaan kekerasan untuk menghilangkan ancaman keamanan. Dengan kata lain, Konfusianisme merupakan pendekatan budaya strategis yang damai dan defensif, sedangkan *Parabellum* adalah pendekatan budaya strategis yang rawan perang.

Huiyun Feng dan Kai He (2021) dalam analisis mereka tentang budaya strategis Cina mengembangkan argumen berdasarkan teori Johnston. Mereka sepakat bahwa budaya strategis Cina didasarkan pada perpaduan antara Konfusianisme dan *realpolitik*. Menurut Feng dan He, kedua pendekatan ini memiliki peran yang sama penting dan bekerja secara bersamaan dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Cina. Namun, keduanya berfungsi secara berbeda tergantung pada situasi yang dihadapi. Saat menghadapi ancaman eksternal, Feng dan He berargumen bahwa Konfusianisme dan *realpolitik* digunakan berdasarkan tingkat ancaman yang berbeda. *Realpolitik* lebih berperan ketika ancaman bersifat tinggi, seperti yang mengancam keamanan nasional atau kedaulatan. Sebaliknya, Konfusianisme mempengaruhi kebijakan ketika ancaman tidak langsung berkaitan dengan keamanan nasional. Jika ancaman

berada pada level menengah, respons Cina dipengaruhi oleh kedua pendekatan ini secara bersamaan (Feng & He, 2021).



Sumber: *A Dynamic Strategic Culture Model and China's Behaviour in the South China Sea* (2021)

Tekanan internasional yang dialami Cina akibat pandemi COVID-19 tidak langsung mengancam keamanan nasionalnya, sehingga budaya strategis yang dominan digunakan dalam konteks ini adalah Konfusianisme, yang sangat berakar dalam tradisi Cina. Konfusianisme merupakan pemikiran yang paling berpengaruh dalam budaya dan gaya hidup masyarakat Cina (Fan, 2000). Gagasan ini mencakup nilai-nilai, tradisi, prinsip, aturan, dan ideologi yang telah lama membentuk sejarah peradaban Cina, serta memiliki pengaruh besar dalam politik dan kebijakan luar negeri negara tersebut.

Sejak Dinasti Qin (221-207 SM), Konfusianisme telah menjadi landasan utama dalam sejarah perjalanan Cina (Feng & He, 2021). Nilai-nilai inti dari Konfusianisme adalah kebajikan (仁), kebenaran (义), kesopanan (礼), kebijaksanaan (智) dan kesetiaan (信). Seluruh nilai berperan menciptakan harmoni sosial dengan melalui rasa hormat, saling peduli, dan menghormati norma-norma bersama. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi untuk menyatukan masyarakat sepanjang sejarah Cina. Partai Komunis Cina menggunakan nilai-nilai yang terkandung dalam Konfusianisme tersebut untuk memperkuat nasionalisme di masyarakat (Q. Zhao, 2018).

Nasionalisme merupakan nilai kolektif yang tertanam dalam masyarakat Cina. Menurut Guibernau, nasionalisme merupakan kondisi psikologis yang menciptakan perasaan memiliki dan menyatukan sekelompok orang dengan persamaan identitas yang didasarkan pada wilayah, budaya sosial, sejarah, dan ikatan emosional saat menghadapi pihak lain (Guibernau, 1996). Guibernau juga menyatakan bahwa nasionalisme dapat menggerakkan kehendak politik, baik dalam konteks domestik maupun internasional.

Sejalan dengan konsep *China Dream* yang diusung oleh Xi Jinping, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konfusianisme. Hal ini terlihat

dari cara Xi menekankan 'karakteristik Cina' dalam kebijakan luar negeri yang ia terapkan. Nasionalisme dalam *China Dream* diwujudkan dengan menumbuhkan rasa identitas nasional melalui setiap kebijakan yang dilaksanakan.

Diplomasi *Wolf Warrior* sebagai Respons Kebijakan Luar Negeri Cina

Diplomasi *Wolf Warrior* merupakan bentuk baru dalam interaksi diplomatik yang muncul sekitar pertengahan tahun 2020. Istilah ini mengacu pada tindakan para diplomat Cina pada awal penyebaran COVID-19. Diplomasi ini menggambarkan diplomat Cina sebagai 'prajurit serigala' yang bersikap agresif dan tegas dalam membela negaranya (Dai & Luqiu, 2021). Diplomasi cara ini menimbulkan kontroversi dan memicu berbagai reaksi, baik dari masyarakat domestik maupun internasional.

Diplomat Cina dalam diplomasi *Wolf Warrior* menunjukkan sikap yang lebih agresif dan tegas dibandingkan dengan pendekatan diplomatik Cina sebelumnya. Diplomasi ini dianggap sebagai pergeseran arah diplomasi dan kebijakan luar negeri Cina, yang sebelumnya dikenal dengan sikap yang *low-profile* (Zhu, 2020). Pendekatan *low-profile* tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Deng Xiaoping dan berlanjut selama beberapa periode kepemimpinan setelahnya.

Deng Xiaoping memperkenalkan konsep *low-profile* dengan istilah "Tao Guang Yang Hui," yang secara resmi berarti "*keeping a low-profile* (tetap bersikap rendah hati)" dan secara harfiah berarti "*to hide one's light and nourish oneself out of sight* (sembunyikan cahayamu dan menjaga diri agar tidak terlihat)" (Pang, 2020). Pendekatan ini mendorong Cina untuk bersikap pasif di kancah internasional, fokus pada pembangunan domestik dan ekonomi nasional. Karakter *low-profile* ini berhasil membawa banyak kemajuan bagi Cina. Oleh karena itu, perubahan dalam sikap Cina di arena politik internasional menarik perhatian banyak pihak.

Perubahan sikap Cina dalam politik internasional mulai mendapat sorotan luas pada awal pandemi COVID-19. Ketika pandemi merebak, Cina menerima banyak tuduhan dan kritik terkait asal usul penyebaran virus. Dalam situasi ini, istilah diplomasi *wolf warrior* muncul setelah salah satu diplomat Cina, Zhao Lijian, yang juga juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, membagikan sebuah artikel konspirasi di media sosialnya. Artikel tersebut menyebutkan bahwa virus COVID-19 berasal dari tentara Amerika Serikat yang berada di Wuhan. Tindakan Zhao ini merupakan tanggapan atas pernyataan Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, yang menyebut COVID-19 sebagai "*China Virus*" (Nagy & Nguyen, 2020). Istilah "*China Virus*" dianggap menghina Cina, dan unggahan Zhao menjadi respons diplomatik terhadap tuduhan tersebut.

Tindakan Zhao Lijian menjadi titik awal kemunculan diplomasi *wolf warrior*. Setelah aksinya mendapat perhatian, banyak diplomat Cina lainnya mulai aktif di media sosial untuk mengikuti jejak Zhao. Menurut laporan Brookings, jumlah aktivitas diplomat Cina di Twitter meningkat empat kali lipat dalam satu setengah tahun terakhir, meskipun sebelumnya hampir tidak ada diplomat yang aktif di platform tersebut (Brandt & Schafer, 2020). Meskipun media sosial, khususnya Twitter, memainkan peran penting dalam diplomasi *wolf warrior*, tindakan para diplomat Cina ini juga tidak terbatas hanya pada media sosial.

Sebuah contoh lain dari diplomasi *wolf warrior* terlihat dalam pertemuan bilateral antara Cina dan Amerika Serikat pada 18 Maret 2021 di Alaska. Pertemuan yang cukup panas tersebut menghadirkan Antony Blinken dan Jake Sullivan sebagai perwakilan Amerika Serikat serta

Wang Yi dan Yang Jiechi sebagai perwakilan Cina. Dalam pidato pembukaannya, Blinken, sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, mengangkat sejumlah isu sensitive bagi Cina seperti Xinjiang, Taiwan, Hong Kong, dan serangan siber terhadap Amerika Serikat. Merespons hal ini, diplomat Cina, Yang Jiechi, memberikan pernyataan tegas, menyebut Amerika Serikat sebagai "juara serangan siber" berdasarkan teknologi dan kemampuan yang dimilikinya (Hansler et al., 2021).

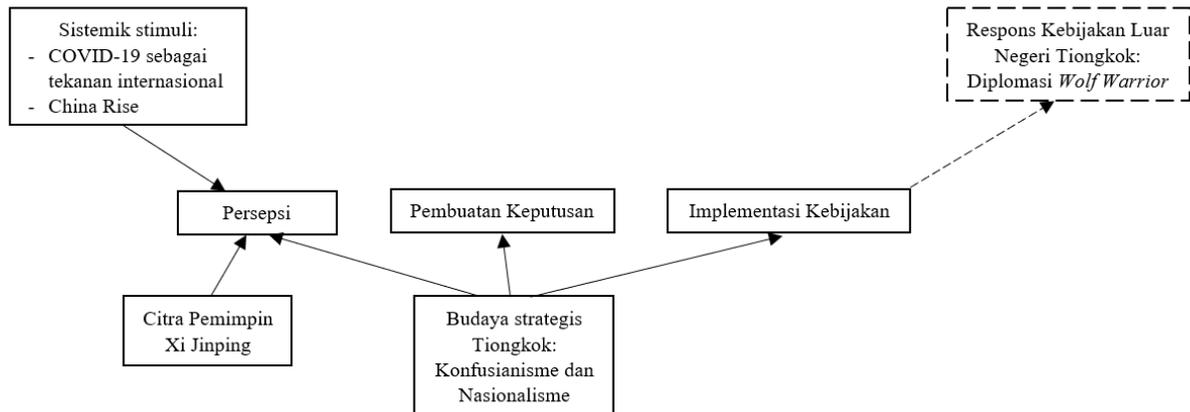
Serangkaian tindakan agresif dan asertif ini menjadi bagian dari diplomasi *wolf warrior*, di mana diplomat Cina secara aktif membela kepentingan nasional mereka selama pandemi COVID-19 (Zhu, 2020). Diplomasi yang ditunjukkan secara eksplisit ini menandakan pendekatan yang lebih agresif dari para diplomat Cina dalam merespons tekanan internasional.

Menurut pandangan teori realisme neoklasik, diplomasi *wolf warrior* dianggap sebagai variabel dependen. Diplomasi ini menjadi respons kebijakan luar negeri Cina terhadap interaksi antara variabel independen dan variabel intervening. Pandemi COVID-19 dan krisis yang disebabkan, merupakan tekanan sistemik yang berperan sebagai variabel independen, memberi tekanan internasional pada Cina. Negara ini banyak dituduh sebagai sumber kekacauan global akibat pandemi, serta dikritik atas penanganan wabah yang meluas menjadi krisis global. Tekanan sistemik ini diterima Cina dan diolah melalui proses domestik sebagaimana dijelaskan dalam teori realisme neoklasik.

Realisme neoklasik menyatakan bahwa tekanan sistemik diproses melalui tiga tahapan domestik, yaitu persepsi, pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan. Dalam proses ini, terdapat empat variabel yang mempengaruhi ketiga tahap tersebut. Proses persepsi dipengaruhi oleh citra pemimpin dan budaya strategis. Budaya strategis tidak hanya mempengaruhi persepsi, tetapi juga berperan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dua variabel lainnya, yaitu hubungan masyarakat-negara dan institusi domestik, berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Keempat variabel ini memiliki tingkat signifikansi yang berbeda-beda tergantung pada situasi. Dalam menghadapi krisis seperti pandemi, variabel yang relevan dan signifikan dalam memengaruhi proses domestik adalah citra pemimpin/*leader images* dan budaya strategis, sedangkan hubungan masyarakat-negara dan institusi domestik lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Oleh karena itu, dalam konteks pandemi COVID-19 sebagai tekanan sistemik, citra pemimpin dan budaya strategis menjadi variabel intervening yang dominan.

Gambar 4. Penerapan teori realisme neoklasik dalam analisis diplomasi *wolf warrior* Cina pada masa pandemi COVID-19



Tahap pertama dalam proses domestik dari masuknya tekanan sistemik adalah persepsi. Proses ini dipengaruhi oleh dua variabel intervening, yaitu citra pemimpin dan budaya strategis. Citra pemimpin merujuk pada bagaimana pihak eksekutif kebijakan luar negeri (FPE), yang meliputi presiden, perdana menteri, anggota kabinet utama, para menteri, penasihat, dan pejabat yang bertugas dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan, mampu memahami tekanan sistemik, kemampuan negara, serta tanggapan yang diperlukan (Ripsman et al., 2016). Citra ini terkait dengan ideologi, kepribadian, dan cara pandang pemimpin atau FPE terhadap tekanan tersebut. Dalam hal ini, citra pemimpin Xi Jinping mempengaruhi bagaimana Cina merespons melalui pelaksana kebijakan luar negeri, yaitu para diplomatnya.

Sebagai pemimpin Cina, Xi Jinping membawa cara pandang, ideologi, kepribadian, dan citra yang melekat padanya mempengaruhi cara Cina memandang tekanan internasional. Sikap ambisius dan visionernya terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Diplomasi *wolf warrior* yang dilakukan para diplomat juga merupakan respons terhadap seruan Xi Jinping yang disampaikan setahun sebelum pandemi COVID-19. Menurut Reuters, Presiden Xi meminta para diplomat untuk menunjukkan "semangat berjuang (*fighting spirit*)" (Zhai & Tian, 2020). Xi menginstruksikan agar mereka mengambil langkah yang lebih berani saat menghadapi tantangan internasional.

Sejalan dengan arahan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, memberikan tanggapan tegas terkait diplomasi *wolf warrior*. Ia menanggapi bahwa jika diplomasi *wolf warrior* disebutkan karena Cina membalas dan menyampaikan kebenaran ketika menghadapi serangan yang tidak etis, ia tidak melihat hal tersebut sebagai suatu masalah. Hua menambahkan bahwa sebutan tersebut tidak masalah selama tindakan tersebut bertujuan membela kedaulatan, kepentingan pembangunan, keamanan, serta martabat Cina dan keadilan internasional. Ia juga menegaskan bahwa respons diplomat Cina sepadan dengan kapasitas yang dimiliki negara (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2020).

Budaya strategis Cina, yang mencakup tradisi, perilaku, kepercayaan, serta nilai-nilai yang terbentuk dari geopolitik, sejarah, dan budaya politiknya, berperan dalam membentuk persepsi Cina terhadap tekanan internasional. Konfusianisme dan nasionalisme yang telah mengakar dalam masyarakat Cina memengaruhi tindakan yang diambil oleh aktor kebijakan

luar negeri (FPE). Nilai-nilai ini berdampak pada proses pengambilan keputusan dan penerapan kebijakan.

Diplomasi *wolf warrior* sebagai perwujudan bentuk nasionalisme dan patriotisme yang dilakukan oleh diplomat Cina memperoleh dukungan luas dari masyarakat Cina. Dukungan ini terlihat jelas di platform media sosial seperti Weibo dan Twitter. Weibo, sebagai media sosial lokal Cina, dipenuhi dengan komentar positif mengenai diplomat *wolf warrior*. Dalam salah satu unggahan di Weibo mengandung pernyataan "*wolf warrior, so what?*" dengan sebuah komentar yang menyebutkan, "Lindungi juru bicara (Kementerian Luar Negeri) kami; pasti melelahkan menanggapi orang-orang tersebut," yang mendapatkan sekitar 67.000 likes, menjadikannya salah satu komentar paling populer terkait topik diplomasi ini (Chen, 2023). Unggahan ini muncul saat diplomasi *wolf warrior* menjadi sorotan dan mendapat banyak kritik internasional.

Masyarakat Cina melihat kritik internasional terhadap diplomasi *wolf warrior* sebagai upaya untuk menghambat kebangkitan Cina (Zhu, 2020). Kritikan ini justru memperkuat rasa nasionalisme dan patriotisme. Nilai nasionalisme yang didorong oleh Presiden Xi Jinping serta arahan yang ia berikan kepada diplomat Cina menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian mereka. Kritik yang berkelanjutan tidak menghentikan langkah diplomat Cina dalam upaya diplomasi *wolf warrior*.

Citra kepemimpinan dan budaya strategis turut mempengaruhi bagaimana diplomat Cina sebagai FPE merespons tekanan, khususnya selama krisis COVID-19. Semangat nasionalisme mendorong mereka untuk mengambil keputusan cepat dan mengimplementasikan kebijakan. Mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam menangani tekanan internasional yang diterima negara. Tindakan para diplomat ini dianggap oleh sistem internasional sebagai aksi *state practice* Cina untuk mendapatkan kepentingan nasional mereka.

Krisis COVID-19 dan peran Cina di panggung internasional memaksa diplomat Cina, sebagai eksekutif kebijakan luar negeri, harus mengambil keputusan dengan cepat. Para diplomat menggunakan pendekatan *wolf warrior* yang tegas dan agresif dalam menanggapi kritik serta tuduhan terhadap Cina. Di bawah arahan Presiden Xi, mereka dengan berani melawan kritik internasional, menunjukkan bahwa Cina kini merupakan kekuatan yang sedang bangkit dan bukan lagi negara kecil yang lemah. Peningkatan Cina sebagai *raising power* dalam sistem internasional cukup untuk memberikan Cina kekuatan untuk melakukan perlawanan. Meskipun menghadapi tekanan internasional mengenai krisis Covid-19, diplomat Cina menganggap ini sebagai ancaman level rendah. Sehingga dalam kasus ini, nilai-nilai Konfusianisme dalam budaya strategis tetap menjadi faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pada akhirnya, diplomasi *wolf warrior* menjadi respons defensif Cina terhadap tekanan internasional yang meningkat selama pandemi COVID-19.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terjadinya diplomasi *wolf warrior* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Analisis dengan menggunakan teori realisme neoklasik menunjukkan bahwa terdapat faktor eksternal dan faktor internal yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Faktor eksternal yang ada berupa dorongan sistemik, dalam artikel ini berupa krisis pandemi COVID-19, yang menjadi tekanan

internasional terhadap serta posisi Cina dalam panggung global sebagai negara *raising power*. Sementara, faktor internal ditunjukkan dengan keberadaan citra pemimpin dan juga budaya strategis. Kedua faktor ini kemudian menjadi penting karena diplomasi *wolf warrior* dalam menghadapi krisis membutuhkan respon cepat dalam pengambilan keputusan.

Cina berada di tempat yang sulit akibat krisis COVID-19 yang dirasakan seluruh negara. Cina merasakan peningkatan tekanan internasional berupa tuduhan bahwa mereka merupakan sumber penyebaran virus, serta kritik atas penanganan pandemi yang mereka lakukan. Respons secara tegas saat itu dirasa merupakan pilihan terbaik untuk melindungi nama baik negara dan mempertahankan kepentingan internasionalnya. Hal ini sejalan dengan pandangan pemimpin mereka, Xi Jinping, yang mendukung terjadinya diplomasi *wolf warrior*. Karakteristik kepemimpinan Xi yang kuat dan tegas, ditambah dengan Konfusianisme dan nasionalisme sebagai budaya strategisnya, memperkuat keperluan Cina akan diplomasi *wolf warrior*.

Dengan menggunakan analisis realisme neoklasik, diplomasi *wolf warrior* merupakan *output* dari interaksi faktor eksternal dan internal yang kompleks, imaji pemimpin Cina, budaya strategis, tekanan internasional, dan elevasi posisi Cina di sistem internasional berperan menjadi katalisator dalam munculnya diplomasi ini. Faktor-faktor yang menjadi pilar dari diplomasi *wolf warrior* ini menjadi krusial untuk dipahami dalam menilisi dampak diplomasi ini terhadap hubungan internasional dan kebijakan luar negeri Cina di masa depan.

REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Benvenuti, A., Chung, C. P., Khoo, N., & Tan, A. T. H. (2022). China's Foreign Policy: The Emergence of a Great Power. In *China's Foreign Policy: The Emergence of a Great Power*. <https://doi.org/10.4324/9781003088288>
- Booth, K. (1990). The Concept of Strategic Culture Affirmed. In *Strategic Power: USA/USSR*. https://doi.org/10.1007/978-1-349-20574-5_8
- Brandt, J., & Schafer, B. (2020). *How China's 'wolf warrior' diplomats use and abuse Twitter*. Brookings.
- Cabestan, J.-P. (2020). Introduction - China's New Diplomacy: Old Wine in a New Bottle? In *A Handbook of China's International Relations*.
- Chang-Liao, N. C. (2016). China's new foreign policy under Xi Jinping. *Asian Security*, 12(2). <https://doi.org/10.1080/14799855.2016.1183195>
- Chen, K. A. (2023). Digital nationalism: How do the Chinese diplomats and digital public view "Wolf Warrior" diplomacy? *Global Media and China*, 8(2). <https://doi.org/10.1177/20594364231171785>
- Cheng, M. (2022). *A Neoclassical Realist Analysis of China's Foreign Policy Decision Making 2012-2020*. University of Auckland.
- Dai, Y., & Luqiu, L. R. (2021). China's Wolf Warrior Diplomacy and Xi Jinping's Grand Diplomatic Strategy. *Researchgate*, April, 1-35. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22107.08484>
- Fan, Y. (2000). A classification of Chinese culture. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.1108/13527600010797057>
- Feng, H., & He, K. (2021). A dynamic strategic culture model and China's behaviour in the South China Sea. *Cambridge Review of International Affairs*, 34(4).

<https://doi.org/10.1080/09557571.2019.1642301>

- Gan, N. (2021). *14 countries and WHO chief accuse China of withholding data from pandemic origins investigation*. CNN. <https://edition.cnn.com/2021/03/31/asia/who-report-criticism-intl-hnk/index.html>
- Gill, B. (2022). *Daring to Struggle*. In *Daring to Struggle*. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197545645.001.0001>
- Hansler, J., Gaouette, N., & Atwood, K. (2021). *US and China Trade Barbs after Blinken Warns of Need to Respect Global Order or Face a 'More Violent World.'* CNN. <https://edition.cnn.com/2021/03/18/politics/blinken-sullivan-china-alaska-meetings/index.html>
- Hu, W. (2019). Xi Jinping's 'major country diplomacy': The role of leadership in foreign policy transformation. *Journal of Contemporary China*, 28(115). <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1497904>
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relation: Theory and Approaches*. In *Oxford University Press*.
- Johnston, A. I. (1995). *Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in Chinese History*. Princeton University Press.
- Jones, L. (2024). *Ranked: World's Most Influential Countries, 2024*. CEOWORLD Magazine. <https://ceoworld.biz/2024/04/04/ranked-worlds-most-influential-countries-2024/>
- Karp, P., & Davidson, H. (2020). *China bristles at Australia's call for investigation into coronavirus origin*. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/australia-defends-plan-to-investigate-china-over-covid-19-outbreak-as-row-deepens>
- Kim, J. (2021). China's Achievements and Challenges: Reflections on a Rising Power's Predicaments. *Journal of Contemporary China*, 30(129). <https://doi.org/10.1080/10670564.2020.1827349>
- Kupchan, C. A. (1994). *The Vulnerability of Empire*. In *The Vulnerability of Empire*. <https://doi.org/10.7591/9781501738708>
- Lai, Y. M. (2013). Nationalism and power politics in Japan's relations with China: A neoclassical realist interpretation. In *Nationalism and Power Politics in Japan's Relations with China: A Neoclassical Realist Interpretation*. <https://doi.org/10.4324/9780203100103>
- Lau, S., & Wong, C. (2020). *Germany pushes China for answer to coronavirus origin*. South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3080918/germany-pushes-china-answers-coronavirus-origin-adding>
- Leguey-Feilleux, J.-R. (2008). *The Dynamics of Diplomacy*. In *The Dynamics of Diplomacy*. <https://doi.org/10.1515/9781685856717>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2020). *Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on December 10, 2020*. Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. http://english.scio.gov.cn/pressroom/2020-12/11/content_77001530.htm
- Nagy, S., & Nguyen, H. (2020). *Cowboy Diplomacy Meets Wolf Warrior Diplomacy : All Politics Are Local*. October, 8.
- Pang, Z. (2020). FROM TAO GUANG YANG HUI TO XIN XING. In *From Tao Guang Yang Hui to Xin Xing*. <https://doi.org/10.1355/9789814881814-006>

- Reuters. (2020). *Europe, U.S. should say "no" to China's "wolf-warrior" diplomacy - EU envoy*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-china-eu-usa-idUSKBN28K0JS>
- Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W., & Lobell, S. E. (2016). Neoclassical Realist Theory of International Politics. In *Neoclassical Realist Theory of International Politics*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199899234.001.0001>
- Rose, G. (1998). Neoclassical realism and theories of foreign policy. *World Politics*, 51(1). <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>
- Silver, L., Devlin, K., & Huang, C. (2020). Unfavorable Views of China Reach Historic Highs in Many Countries. *Pew Research Center*, 29. <https://www.pewresearch.org/global/2020/10/06/unfavorable-views-of-china-reach-historic-highs-in-many-countries/>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to Qualitative Research Methods. In *Introduction to Qualitative Research Methods*. <https://doi.org/10.1002/9781394260485>
- Tsuji, C. (2024). *Belt and Road Initiative*. Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Belt-and-Road-Initiative>
- U.S. Department of State. (2021). *Joint Statement on the WHO-Convened COVID-19 Origins Study*. U.S. Department of State. <https://www.state.gov/joint-statement-on-the-who-convened-covid-19-origins-study/>
- Wang, Z. (2014). The Chinese Dream: Concept and Context. *Journal of Chinese Political Science*, 19(1). <https://doi.org/10.1007/s11366-013-9272-0>
- WHO. (2020). *WHO Director General's Opening Remarks at the Media Briefing on COVID-19*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>
- Xinhua. (2013). *President vows to bring benefits to people in realizing "Chinese dream."* Global Times. <https://www.globaltimes.cn/content/768548.shtml>
- Xuetong, Y. (2014). From keeping a low profile to striving for achievement. *Chinese Journal of International Politics*, 7(2). <https://doi.org/10.1093/cjip/pou027>
- Zhai, K., & Tian, Y. L. (2020). *In China, a young diplomat rises as aggressive foreign policy takes root*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-china-diplomacy-insight-idUSKBN21I0F8/>
- Zhao, Q. (2018). The influence of Confucianism on Chinese politics and foreign policy. *Asian Education and Development Studies*, 7(4). <https://doi.org/10.1108/AEDS-03-2018-0057>
- Zhao, S. (2022). The Dragon Roars Back. In *The Dragon Roars Back*. <https://doi.org/10.1515/9781503634152>
- Zhu, Z. (2020). *Interpreting China's "Wolf-Warrior" Diplomacy*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2020/05/interpreting-chinas-wolf-warrior-diplomacy/>